journal.siddiqinstitute.org/ijes

Indonesian Journal Of Economy Studies

UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN EDUPRENEURSHIP DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) LEMBANG PARINDING

Efforts to Increase Village Accountability and Edupreneurship Through Village-Owned Enterprises (Bumdes) Lembang Parinding

Hardiyono Hardiyono, Wendy Kala Tikupadang
1 STIE Amkop Makassar
2 Universitas Kristen Indonesia Paulus
dyonsrj@gmail.com *(Korespondensi)*

Keyword:
BUMDes, Accountability, Edupreneurship

Kata Kunci:
BUMDes, Akuntabilitas, Edupreneurship.

Abstract: *This research aims to increase the accountability and education of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Lembang Parinding. In this research, the author used descriptive qualitative research. Analysis of the interactive model using data collection techniques in the form of interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in increasing Lembang Parinding Accountability and Edupreneurship, also through observation and documentation. The conclusion from the research results states that Village-Owned Enterprises (BUMDes) are not good enough at increasing accountability and edupreneurship in helping to overcome the economic problems of the community in Lembang Parinding. Independent businesses run by BUMDes are running well.*

Abstrak: Penelitian ini berjutujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Edupreneurship Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lembang Parinding. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Analisis model interaktifnya dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Edupreneurship Lembang Parinding, juga melalui observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) susah cukup baik dalam meningkatkan akuntabilitas dan edupreneurship dalam membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat di lembang parinding. Usaha mandiri yang dijalankan BUMDes sudah berjalan dengan baik.

Informasi Artikel: Diterima: xx-xx-xxxx, Disetujui: xx-xx-xxxx, Dipublikasikan: xx-xx-xxxx

I. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan peraturan desa. BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Permendagri No. 39 tahun 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Pemerintah pusat melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan perdesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Untuk mendukung pembangunan nasional tentunya harus diikuti oleh pembangunan di pedesaan [1]. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu mekanisme di mana pemerintah masing-masing daerah dan masyarakat setempat mengelola sumber daya yang tersedia dan membangun suatu struktur suatu mitraantara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut [2].

Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawabaan direalisasikan dalam bentuk dokumen dan laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga dapat diukur keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat [3]. Akuntabilitas pada dasarnya menyediakan peran yang sangat penting dalam menciptakan kegiatan tata kelola yang baik sebagai bagian untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah (Khotami, 2017).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes mungibangkit diantaranya adalah keterbatasan skill pengelola dan kesulitan untuk mengembangkan unit bisnis [4]. Pengelola BUMDes belum memiliki pengalaman dan pengetahuan *edupreunership* dalam menciptakan, mengembangkan unit bisnis.Edupreneurship adalah program pelatihan bagaimana mengenalkan konsep-konsep entrepreneurship yang dilengkapi dengan berbagai contoh aplikasinya melalui proses pendidikan menggunakan berbagai strategi bisnis, Maka dari itu Edupreneunership

sangat berperan penting dalam BUMDes untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengelola untuk menciptakan serta mengembangkan suatu bisnis baru.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan desa. Dalam proses pertumbuhan masyarakat BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan [5]. Aset ekononomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan sebagai upaya untuk memperkuat aspek ekonomi kelembagaanya [6]. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai lembaga yang menaungi.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai- nilai kehidupan bermasyarakat.

Indikator pembangunan ekonomi pada desa diantaranya yaitu, infrastruktur desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, akses informasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, serta pendapatan penduduk. Sektor publik adalah organisasi yang kegiatannya melibatkan upaya untuk menghasilkan barang dan jasa publik dalam menanggapi kebutuhan dan hak publik. Standar ini digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Lembaga Pelayanan Publik. Secara umum SAP berbentuk peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tambahan dan Perubahan. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Pasal 17 tentang Pendapatan Negara atau Daerah, merupakan hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BUMDes dalam lembang parinding belum sepenuhnya dijalankan dan kurangnya kinerja serta indikator dan peningkatan perekonomian didesa ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan

bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa, maka keinginan penulis untuk menganalisis lebih jauh pengelolaan badan usaha milik desa dengan mengangkat judul penelitian " Upaya Peningkatan Akuntabilitas Dan Edupreneurship Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lembang Parinding".

II. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Lembang Parinding, Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dalam menganalisis lebih jauh mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Edupreneurship Lembang Parinding.

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau referensi yang sangat berkaitan dengan judul penelitian maupun tulisan-tulisan ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BUMDes Ditinjau dari Akuntabilitas Perkembangan Desa

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang pimpinan atau pelaksana suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan sesuai petunjuk teknis. Hayyuna, dkk (2014) mengemukakan bahwa salah satu cara untuk menyukseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh BUMDes dalam mengelola dan memaksimalkan aset- aset yang ada di desa. Hal ini sejalan dengan PP No. 72 tahun 2005 pasal 78 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa.

Peran BUMDes Ditinjau dari Edupreunership Perkembangan Desa

Mengacu pada salah satu tujuan BUMDes yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian, maka dapat diidentifikasi salah satu peran BUMDes dapat ditinjau dari Edupreurnship di masyarakat. Dengan terbentuknya BUMDes di desa-desa tentunya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan BUMDes, yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat desa setempat. BUMDes diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya, seperti halnya antara lain dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan desa setempat, sehingga menurunkan tingkat pengangguran di desa.

Akuntabilitas dan Edupreneurship Masyarakat Lembang Parinding

Keberadaan BUMDes dalam Lembang Parinding dapat dirasakan oleh masyarakat setempat, dikarenakan Akuntabilitas serta Edupreunership yang sangat

penting dalam sebuah BUMDes, untuk dapat mengembangkan kemajuan perekonomian masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Alpius Tangalayuk, S.S selaku ketua Lembang Parinding, sebagai berikut:

"...BUMDes didesa ini memiliki unit usaha, pertama itu usaha peternakan, kedua usaha pertanian, ketiga perbengkelan, keempat perdagangan, dan adapun sebagian beberapa yang usaha sayuran. Usaha ini sangat dibutuhkan didesa ini. Contohnya kan disini yang lebih banyak diminati oleh masyarakat adalah usaha babi dan kami kasi kepercayaan untuk merawat sehingga hasilmya dibagi dua."

Melalui BUMdes ini Masyarakat lembang Parinding dapat membuat usaha mulai dari peternakan, pertanian, perbengkelan, dan juga perdagangan. Banyak Masyarakat Parinding memilih usaha peternakan dengan cara beternak hewan berupa babi, sehingga Pemerintah Lembang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin beternak babi dan setelah babi tersebut siap untuk dijual maka hasil dari penjualan itu akan dibagi dua. setengah untuk masyarakat yang memelihara babi tersebut dan setengahnya akan dikembalikan ke dana BUMDes yang nantinya akan dipergunakan lagi untuk pengembangan usaha masyarakat yang lainnya.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Lembang Parinding Ibu Sarna selaku bendahara Lembang Memberikan respon positif terhadap BUMDes karena telah membantu masyarakat. Jika Babi yang diberikan adalah babi betina maka akan dikembang biakkan dan nantinya hasil dari ternak babi tersebut akan dibagi dua hasilnya. Dengan adanya BUMDes di Lembang ini membuat perekonomian masyarakat disini sedikit meningkat.

Masyarakat dilembang ini sudah ada beberapa yang membuat atau menciptakan usahasendiri. Selain Memiliki minat pada bidang peternakan masyarakat desa parinding juga mengembangkan usaha di bidang lainnya, hal ini disampaikan oleh Bapak Alpius Tangalayuk, S.S, Selaku kepala Lembang. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa masyarakat yang telah membangun usaha Bengkel, Berdagang dan juga Bertani. Salah satu bentuk peran BUMDes yaitu pembelian alat Traktor yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam membajak sawah.

Kondisi Masyarakat Lembang Parinding Sebelum Adanya BUMDes

Lembang Parinding yang terletak di Kabupaten Toraja Utara merupakan desa yang mengalami beberapa kekurangan dalam bidang perekonomian serta kurangnya pemahaman mengenai suatu usaha. Sudah cukup lama masyarakat desa ini merasakan kesulitan ekonomi. Menurut Bapak Alpius Tangalayuk, S.S, sebagai berikut:

"...Kondisi masyarakat di Lembang Parinding untuk kelas perekonomian menengah keatas dan juga masih ada yang dibawah yang perekonomiannya itu masih dibawah rata-rata yang penghasilannya tidak mencukupi dan orang seperti inilah yang mendapat bantuan dari pemerintah desa."

Maka dari masalah inilah dapat diketahui kondisi masyarakat pada saat kesulitan dalam membuat suatu usaha dikarenakan kurangnya pemahaman dalam menciptakan suatu usaha baru.

IV. KESIMPULAN

BUMDes berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan edupreunership dalam desa. Peran BUMDes terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan desa dan bertanggungjawab terhadap usahanya, peran BUMDes terkait aspek edupreunership berimplikasi terhadap usaha mandiri yang diciptakan oleh masyarakat dilembang tersebut ShinggaTemuan dilapangan menunjukkan bahwa :

Pertama, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran penting dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Edupresneurhip Lembang Parinding hal ini dapat dilihat dari pemberian modal kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha baik itu usaha pertanian, peternakan,perdagangan dan beberapa usaha mandiri lainnya. Selain itu masyarakat merasa sangat terbantu dengan Adanya BUMDes karena dapat memiliki penghasilan meskipun awalnya tidak memiliki modal untuk usaha.

Kedua Edupreunership mengambil peran penting dalam meningkatkan efektifitas kinerja serta indikator keberhasilan Lembang Parinding, dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat dalam membangun usaha mandiri melalui BUMDes agar masyarakat yang hidup di pedesaan mampu mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

REFERENSI

[1] A. R. F. Putri, I. F. Latiep, N. fajri Irvan, and R. Herison, "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa: Peran Partisipasi Masyarakat, Kualitas Pengelola Serta Transparansi," *SEIKO: Journal of Management & Business*, vol. 4, no. 3, pp. 89–96, 2022.

[2] Z. Zulfikar Yusya Mubarak, I. Ifah Finatry Latief, N. Nuni Wulansari, R. A Reski Fausia Putri, F. Fajar Nur Wibowo, and N. A Nur Asri Ainun, "PENGUATAN SEKTOR TECHNOPRENEURSHIP UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT." UNAIC Press, 2023.

[3] A. Anwar, C. J. E. Sumual, M. Muliati, and R. O. Lestari, "Profitabilitas dan corporate socialresponsibility (csr) terhadap nilai perusahaan," *AKUNTABEL*, vol. 18, no. 1, pp. 82–90, 2021.

[4] R. Furwanti, H. Hardiyono, and D. M. Lestari, "Towards Understanding Economic Growth in Indonesia: Reinterpretation Of Lewis Model In Improving Lingving Standars of Agricultural Sector Workforce Evidence From Indonesia," *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, vol. 17, no. 1, 2021, Accessed: Jul. 08, 2023. [Online]. Available: http://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep/article/view/13760

[5] S. Thaha, I. Irdawati, H. Hariyanti, L. Saleh, and H. Hardiyono, "Effect of Knowledge and Locus Of Control on Intellectual Capital and Quality of Financial Reports," *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 5, no. 1, pp. 284–295, 2022.

[6] I. Irdawati, M. Misnawati, B. Bindarto, Y. Yunila, and H. Hardiyono, "Direction of the Cost of Equity Capital in Manufacturing Companies," *Jurnal Akuntansi*, vol. 25, no. 2, pp. 314–329, 2021.